

ANALISIS KLASIFIKASI DAERAH  
DAN DISPARITAS PEMBANGUNAN EKONOMI  
ANTAR PROPINSI DI PULAU SUMATERA



SKRIPSI

OLEH:

SYAHRIAL

NPM: C1A010015

UNIVERSITAS BENGKULU  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
JURUSAN KONOMI PEMBANGUNAN  
2014

ANALISIS KLASIFIKASI DAERAH  
DAN DISPARITAS PEMBANGUNAN EKONOMI  
ANTAR PROPINSI DI PULAU SUMATERA



SKRIPSI

Diajukan Kepada Universitas Bengkulu  
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Dalam Menyelesaikan  
Program Sarjana Ekonomi

OLEH:

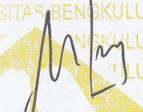
SYAHRIAL  
NPM: C1A010015

UNIVERSITAS BENGKULU  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
JURUSAN KONOMI PEMBANGUNAN  
2014



**Skripsi oleh Syahrrial  
telah diperiksa dan disetujui untuk diuji**

**Bengkulu, 05 Maret 2014**  
**Pembimbing**



**Novi Tri Putri, SE., M.Sc**  
**NIP. 19801115 200501 2 003**



**Mengetahui:**  
**Ketua Jurusan Ekonomi Pembangunan**



**Yusnida, SE., M.Si**  
**NIP. 19611222 198803 2 002**

Skripsi oleh Syahril ini telah dipertahankan di depan penguji pada hari Rabu, 05 Maret 2014

Bengkulu, 05 Maret 2014

Dewan Penguji

Ketua,

Benardin, SE., M.T.

NIP. 19640911 199103 1 003

Sekretaris

Novi Iri Putri, SE., M.Sc  
NIP. 19801115 200501 2 003

Anggota

Yusnida, S.E., M.Si  
NIP. 19611222 198803 2 002

Mengetahui :

Wakil Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unib  
Wakil Dekan Bidang Akademik

Dr. Fahrudin JS. Pareke, SE., M.Si  
NIP. 19710917 199903 1 004

## **PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin atau meniru dalam bentuk rangkaian kalimat atau simbol yang menunjukkan gagasan atau pendapat atau pemikiran dari penulis lain, yang saya akui sebagai tulisan saya sendiri, dan atau tidak terdapat bagian atau keseluruhan tulisan yang saya salin, tiru, atau ambil dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan bagi penulis aslinya.

Apabila saya melakukan hal tersebut di atas, baik sengaja ataupun tidak, dengan ini saya menyatakan menarik skripsi yang saya ajukan sebagai hasil tulisan saya sendiri. Biila kemudian terbukti bahwa saya ternyata melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orag lain seolah-olah hasil pemikiran saya sendiri, berarti gelar dan ijazah yang telah diberikan oleh Universitas batal saya terima.

Bengkulu, 05 Maret 2014

Syahrial

## **ABSTRACT**

### **THE ANALYSIS CLASSIFICATION OF REGION AND DISPARITY OF DEVELOPMENT ECONOMIC BETWEEN PROVINCE IN SUMATERA ISLAND**

**Syahrial<sup>1</sup>**  
**Novi Tri Putri<sup>2</sup>**

*This research aim are to classify the region, measure economic with disparity and correlation of percapita income and economic disparity in Sumatera during period 2004-2012. The research used secondary data from Central Biro Statistic Bengkulu province with the tools of analysis are Klassen typology, Williamson index, scatter plot of percapita income and economic disparity. This research shows that during the period 2004-2012 province with high income and high growth is Kepulauan Riau province, province with high income but low growth is Riau, province with high growth but low income are North Sumatera, West Sumatera, Jambi, South Sumatera, Bengkulu, and Lampung. And than, the province with low income and low growth are Aceh and Kepulauan Bangka Belitung. Economic disparity among province in Sumatera is moderate William indeks 0.455-0.553. in the other side the scatter plots show that correlation of percapita income and economic disparity in Sumatera has negatif relation. It's mean that when perkapita income increase, the economic disparity decrease or disparity lower when perkapita income higher.*

*Keywords: Clasification of region, disparity of development economic, perkapita income, economic growth*

- 1) *Student*
- 2) *Supervisor*

## **RINGKASAN**

### **ANALISIS KLASIFIKASI DAERAH DAN DISPARITAS PEMBANGUNAN EKONOMI ANTAR PROPINSI DI PULAU SUMATERA**

Syahrial<sup>1</sup>

Novi Tri Putri<sup>2</sup>

Pertumbuhan ekonomi Indonesia berada pada urutan kedua setelah China, dengan kisaran 6,5% pada tahun 2011 dan 6,23% ditahun 2012. Nilai ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia secara agregat diharapkan akan bisa menopang pembangunan nasional maupun regional. Perbedaan PDRB perkapita dan pembangunan di Sumatera menuntut pemerintah untuk berusaha semaksimal mungkin dalam meningkatkan pembangunan ekonomi. Hal ini terlihat dari PDRB perkapita yang dihasilkan masing-masing propinsi di Pulau Sumatera sangat beragam, Propinsi yang memiliki PDRB perkapita tertinggi tahun 2012 adalah Propinsi Kepulauan Riau sebesar 25.659.304 rupiah, dan yang paling rendah Propinsi Bengkulu sebesar 5.356.595 rupiah. Menurut penilitia Soleh (2010) Klasifikasi propinsi di Pulau Sumatera masih tersebar di empat kuadran yang berarti bahwa masih terwujud kesenjangan antar propinsi di Pulau Sumatera. Untuk mewujudkan pembangunan daerah, tidak bisa hanya mengandalkan kemampuan dalam daerahnya saja akan tetapi membutuhkan kerjasama dengan daerah lain, yakni terkhusus sesama satu region tertentu seperti satu kawasan pulau, sub kawasan pulau, dan lain-lain.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui klasifikasi daerah, disparitas pembangunan ekonomi antar propinsi serta untuk mengetahui hubungan antara pendapatan perkapita dan disparitas pembangunan ekonomi di Pulau Sumatera tahun 2004-2012. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang bersumber dari instansi pemerintah beserta situs Badan Pusat Statisti (BPS). Metode analisis yang digunakan adalah tipologi Klassen, indeks Williamson, dan tren.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa selama periode pengamatan 2004-2012 propinsi yang termasuk sebagai propinsi yang cepat maju dan cepat tumbuh adalah Propinsi Kepulauan Riau, propinsi yang maju tapi tertekan adalah Propinsi Riau, propinsi dengan klasifikasi daerah yang berkembang cepat adalah Sumatera Utara, Sumatera Barat, Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu, dan Lampung. Sedangkan propinsi yang relatif tertinggal adalah Propinsi Aceh dan Kepulauan Bangka Belitung. Disparitas pembangunan antar propinsi di Pulau Sumatera cenderung menurun (semakin merata) dengan pembangunan yang moderat (sedang). Hubungan antara pendapatan perkapita dan disparitas pembangunan ekonomi di Pulau Sumatera adalah berhubungan negatif atau berbanding terbalik. Artinya bahwa apabila pendapatan perkapita naik maka disparitas pembangunan ekonomi di Pulau Sumatera cenderung menurun atau

pembangunan ekonominya semakin merata seiring dengan kenaikan pendapatan perkapita.

Kata Kunci: Klasifikasi daerah, disparitas pembangunan ekonomi, pendapatan perkapita, pertumbuhan ekonomi

- 1) Penulis
- 2) Pembimbing

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur penulis ke hadirat Ilahi Robbi Allah SWT yang telah memberikan berkah dan petunjuk sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Analisis Klasifikasi Daerah dan Disparitas Pembangunan Ekonomi Antar Propinsi di Pulau Sumatera”. Skripsi ini dibuat sebagai syarat menyelesaikan pendidikan Sarjana (S1) Jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bengkulu.

Dalam penulisan ini banyak mendapatkan bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak, untuk itu pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada:

1. Ibu Novi Tri Putri, SE., M.Sc sebagai dosen pembimbing yang telah memberikan bantuan, bimbingan dan arahan dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Tim penguji skripsi yang bersedia memberikan masukan yang berguna yaitu Bapak Benardin, SE., M.T dan Ibu Yusnida, SE., M.Si.
3. Ibu Yusnida, SE., M.Si sebagai ketua Jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bengkulu.
4. Ibu Barika SE., M.Si selaku sekretaris Jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bengkulu.
5. Ibu Armelly, SE., M.Si selaku Pembimbing Akademik selama masa studi.
6. Seluruh Civitas Akademika Jurusan Ekonomi Pembangunan serta Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bengkulu.
7. Para pegawai di Badan Pusat Statistik Propinsi Bengkulu yang telah memberikan data penelitian.

8. Ayahanda Sahap Nasution, Ibunda Asna Dalimunte, dan Saudara/i ku Syahrinan Nst, Eliana Nst, Adi Sakiman Nst, Dahwir Nst, Usmar Usman Nst, Afrina Dewi Nst.
9. Sahabatku di Ekonomi Pembangunan 2010 ( Aris, Devtra, Dian, Nopem, Mufri, Cica, Enda, Nepra, Feby)
10. Organisasi tercinta yang sudah membangun karakter dan sifat kepemimpinanku ( FKSI FEB KBM UNIB, HIMEP FEB UNIB, UKM Kerohanian UNIB, P3M KBM UNIB, DPM KBM UNIB )
11. Sahabat seperjuangan di medan dakwah (M. Arzan & Rosi Nurma Yanti ).
12. Teman-teman Sekum, Bendum, Ketua Bidang yang sudah membantu dalam kepemimpinan saya di HIMEP 2012-2013 ( Windi Y, Peti H, Ica F, Susi RS, Aris S, Lena SWP, Riwanto S.) dan kepemimpinan saya di DPM KBM UNIB 2013-2014 (Alex, Ernia, Fery, Fani, Ardi, Rosi, Bulan, Rika, Meka, Heni, Idha, Beta, Septi, Ismi, Utari, Tuti, Rahmadani, Trisna, Siki, Arzan, Aziz, Hefti).
13. Adek-adekku yang masih studi di Jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bengkulu (Afrina, Pika, Ilmi).
14. Keluarga Besar Putih Biru “We Are The Best”

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih belum sempurna. Maka dari itu, penulis harapkan adanya masukan untuk perbaikan di masa yang akan datang agar skripsi ini dapat menjadai lebih baik. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat.

Bengkulu, 05 Maret 2014

Syahrial

## **Motto dan Persembahan**

### **Motto**

- ...Allah akan mengangkat (derajat) orang-orang yang beriman diantaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat...  
(QS Al-Mujadalah : 11).
- Be your self dan mulai dari diri sendiri.
- Wahai orang-orang yang beriman! Jika kamu menolong (agama) Allah, niscaya Dia akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu. (QS Muhammad : 7)

### **Kupersembahkan kepada:**

- Kedua orang tuaku (Sahap Nst dan Asna Dalimunte) yang sudah bekerja keras dan memotivasiku selama studi.
- Saudara/i ku (Syahrinan Nst, Eliana Nst, Adi Sakiman Nst, Dahwir Nst, Usmar Usman Nst, Afrina Dewi Nst)
- Keponakanku (Ridwan Efendi, Yusuf Kalla, Donita Sari, Rifki Al Mansyur, Evan Muzakkir, Amir Hamzah, Ucok Menek, Robi Nst, Fauzi Nst,
- Kakak iparku (Eriani Siregar, Siti Sarrah, Hafsoh)

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL SKRIPSI.....	ii
H A L A M A N PERSETUJUAN.....	iii
H A L A M A N PENGESAHAN.....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	v
ABSTRACT.....	vi
..	vi
RINGKASAN.....	vii
..	vii
K A T A PENGANTAR.....	viii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	x
D A F T A R ISI.....	xi
D A F T A R TABEL.....	xiii
D A F T A R GAMBAR.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xv
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	6
1.3 Tujuan Penelitian .....	6
1.4 Manfaat Penelitian.....	7
1.5 Ruang Lingkup Penelitian.....	7
BAB II KAJIAN PUSTAKA	

2.1	Landasan Teori.....	8
2.1.1	Pertumbuhan Ekonomi.....	8
2.1.2	Pembangunan Ekonomi.....	12
2.1.3	Jumlah Penduduk.....	12
2.1.4	Disparitas Pembangunan Ekonomi.....	13
2.1.5	Pengukuran Klasifikasi Daerah.....	17
2.1.6	Pengukuran Disparitas Pembangunan.....	19
2.1.7	Hubungan Pertumbuhan Ekonomi dan Disparitas Pembangunan Ekonomi.....	20
2.2	Penelitian Terdahulu.....	21
2.3	Kerangka Analisis.....	23

### BAB III METODE PENELITIAN

	J e n i s	
3.1	Penelitian.....	25
3.2	Jenis dan Sumber Data.....	25
	D e f e n i s i	
3.3	Operasional.....	25
3.4	Metode Pengumpulan Data.....	26
	M e t o d e	
3.5	Analisis.....	27
3.5.1	Analisis Klasifikasi Daerah.....	27
3.5.2	Analisis Disparitas Pembangunan.....	28
3.5.3	Analisis Hubungan Pertumbuhan Ekonomi dan Disparitas Pembangunan Ekonomi.....	30

### BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1	Hasil Penelitian.....	31
4.1.1	Deskripsi Pulau Sumatera.....	31
4.1.2.	Hasil Perhitungan Data dan Interpretasi Data.	34
4.1.2.1	Pertumbuhan Ekonomi dan Pendapatan Perkapita.....	34
4.1.2.2	Klasifikasi Daerah.....	37
4.1.2.3	Disparitas Pembangunan Ekonomi	44
4.1.2.4	Hubungan Pendapatan Perkapita dan Disparitas Pembangunan Ekonomi di Pulau Sumatera.....	45
	.	
	Pembahasan.....	47
4.2	.	47
4.2.1	Klasifikasi Daerah.....	47
4.2.2	Disparitas Pembangunan Ekonomi.....	54

4.2.3	Hubungan Pendapatan Perkapita dan Disparitas Pembangunan Ekonomi di Pulau Sumatera.....	56
	.	
BAB V PENUTUP		
	Kesimpulan.....	
5.1	.	59
	Saran.....	
5.2	.	60
DAFTAR PUSTAKA		
LAMPIRAN		

### DAFTAR TABEL

No	Judul Tabel	Halaman
1.1.	Produk Domestik Regional Bruto Perkapita 10 Propinsi di Pulau Sumatera Berdasarkan Harga Konstan 2000 (Milyar Rupiah).....	2
1.2	Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2000.....	4
1.3.	Persentase Penduduk Miskin 10 Propinsi di Sumatera Dalam 5 Tahun Terakhir.....	5
2.1.	Klasifikasi Daerah Menurut Tipologi Klassen.....	18
3.1.	Klasifikasi Daerah Menurut Tipologi Klassen.....	27

4.1.	Share PDRB Propinsi Terhadap PDRB Pulau Sumatera Periode 2004-2012.....	33
4.2	Pertumbuhan Ekonomi Berdasarkan Propinsi Tahun 2004-2012.....	35
4.3.	Pendapatan Perkapita Berdasarkan Propinsi Tahun 2004-2012..... ..	36
4.4.	Klasifikasi Propinsi Berdasarkan Tipologi Klassen P e r t a h u n 2005-2012.....	43
4.5.	Indeks Williamson Pulau Sumatera Periode 2004-2012..... .....	45
4.6	Hubungan Antara Pendapatan Perkapita dan Disparitas Pembangunan Ekonomi Sumatera.....	46
4.7	Klasifikasi Rata-rata Propinsi di Sumatera Periode 2005-20012 Berdasarkan Tipologi Klassen.....	53

## DAFTAR GAMBAR

No	Judul Gambar	Halaman
2.1.	U Terbalik (Hipotesis Kuznets).....	20
2.2.	K r a n g k a Analisis.....	23

4.1.	Diagram Jumlah Penduduk 10 Propinsi di Sumatera Tahun 2012.....	32
4.2.	Diagram Persentase Penduduk Miskin 10 Propinsi di Sumatera 2008-2012.....	32
4.3.	Diagram Persentase Pertumbuhan Eekonomi Rata-rata 10 Propinsi di Sumatera Tahun 2004-2012.....	34
4.4.	Scatter Klasifikasi Propinsi Berdasarkan Tipologi Klassen Tahun 2005.....	39
4.5.	Scatter Klasifikasi Propinsi Berdasarkan Tipologi Klassen Tahun 2006.....	39
4.6.	Scatter Klasifikasi Propinsi Berdasarkan Tipologi Klassen Tahun 2007.....	40
4.7.	Scatter Klasifikasi Propinsi Berdasarkan Tipologi Klassen Tahun 2008.....	40
4.8.	Scatter Klasifikasi Propinsi Berdasarkan Tipologi Klassen Tahun 2009.....	41
4.9.	Scatter Klasifikasi Propinsi Berdasarkan Tipologi Klassen Tahun 2010.....	41
4.10.	Scatter Klasifikasi Propinsi Berdasarkan Tipologi Klassen Tahun 2011.....	42
4.11.	Scatter Klasifikasi Propinsi Berdasarkan Tipologi Klassen Tahun 2012.....	42
4.12.	Grafik Indeks Williamson Tahun 2004-2012.....	44
4.13.	Hubungan Antara Pendapatan Perkapita dan Disparitas Pembangunan Ekonomi (IW) Sumatera....	46
4.14.	Scatter Klasifikasi Rata-Rata Propinsi di Sumatera Periode 2004-2012 Berdasarkan Tipologi Klassen.....	53

## DAFTAR LAMPIRAN

No	Judul Lampiran	Halaman
1.	Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2000 Menurut Propinsi di Pulau Sumatera (milyar rupiah) Tahun 2004-2012.....	65
2.	Jumlah Penduduk Menurut Propinsi di Pulau Sumatera Tahun 2004-2012.....	66
3.	Pendapatan Perkapita Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2000 Menurut Propinsi di Pulau Sumatera T a h u n 2004-2012.....	67
4.	Pertumbuhan Ekonomi Menurut Propinsi di Pulau Sumatera Tahun 2005-2012.....	68
5.	Klasifikasi Propinsi Di Pulau Sumatera.....	69
6.	Hasil Perhitungan Indeks Williamson Pulau Sumatera Tahun 2004-2012.....	70



## **BAB I PENDAHULUAN**

### **14.1. Latar Belakang**

Indonesia adalah salah satu negara berkembang di kawasan Asia Tenggara, namun perekonomiannya sangat baik dibandingkan dengan negara berkembang lainnya. Hal ini terlihat dari pertumbuhan ekonomi yang sangat tinggi ditengah-tengah kemerosotan perekonomian Eropa. Pertumbuhan ekonomi Indonesia berada pada urutan kedua setelah China, dengan kisaran 6,5% pada tahun 2011 dan 6,23% ditahun 2012. Penurunan pertumbuhan ekonomi pada kuartal IV-2012 ini disebabkan sektor pertanian mengalami penurunan cukup signifikan sebesar 23,06 persen karena siklus musiman (kompas.com, 5/2/2013).

Nilai ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia secara agregat diharapkan akan bisa menopang pembangunan nasional maupun regional. Pertumbuhan ekonomi merupakan suatu tolak ukur keberhasilan dari suatu pembangunan ekonomi. Pembangunan akan terwujud bilamana pertumbuhan ekonomi daerah mengalami peningkatan yang cukup signifikan secara terus menerus setiap tahun. Pembangunan disetiap daerah berbeda-beda satu sama lain, sehingga dituntut pemerintah untuk berusaha semaksimal mungkin dalam meningkatkan pembangunan ekonominya. Cara yang harus dilakukan pemerintah daerah untuk mewujudkan pembangunan ekonomi tersebut adalah melalui peningkatan pertumbuhan ekonomi yang diukur dari peningkatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Cara lain dalam melihat pembangunan ekonomi adalah dengan memperhatikan struktur ekonomi, distribusi pendapatan antar penduduk, antar daerah, dan antar sektor (Arsyad, 1999).

Keadaan perekonomian daerah disebut mengalami pertumbuhan bilamana tingkat aktivitas ekonominya tahun sekarang lebih tinggi dibandingkan dengan aktivitas ekonomi tahun sebelumnya. Dari aktivitas ekonomi akan menghasilkan suatu

produk berupa barang dan jasa, sehingga maksud dari pertumbuhan disini lebih dikerucutkan menjadi sebuah definisi yakni pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan output berupa barang dan jasa yang dihasilkan suatu daerah secara terus menerus.

Keadaan ekonomi setiap propinsi di Pulau Sumatera sangat beragam, ada yang baru mulai berkembang dari titik awal seperti Kepulauan Riau dan Bangka Belitung dan ada yang sudah lebih lama berkembang seperti Riau dan Sumatera Utara. Berikut ini perkembangan Produk Domestik Regional Bruto Perkapita (PDRB Perkapita) berdasarkan harga konstan tahun 2000 dari sepuluh propinsi di pulau Sumatera.

Tabel 1.1. Produk Domestik Regional Bruto Perkapita 10 Propinsi di Pulau Sumatera Berdasarkan Harga Konstan Tahun 2000 (Milyar Rupiah)

No	Propinsi	Produk Domestik Regional Bruto Perkapita		
		2004	2008	2012
1	Aceh	9.873.600	7.938.102	7.797.298
2	Sumatera Utara	6.873.424	8.140.572	10.174.795
3	Sumatera Barat	6.080.535	7.349.876	8.857.299
4	Riau	16.642.380	17.552.927	17.929.822
5	Jambi	4.553.353	5.486.582	6.282.815
6	Sumatera Selatan	7.142.581	8.153.137	9.361.000
7	Bengkulu	3.805.965	4.495.699	5.356.595
8	Lampung	4.000.990	4.656.180	5.601.165
9	Kepulauan Bangka Belitung	8.219.435	8.810.063	9.437.145
10	Kepualaan Riau	23.916.043	25.478.176	25.659.304

Sumber: [bps.go.id](http://bps.go.id) (Data Diolah)

Dari Tabel 1.1 dapat dilihat bahwa PDRB perkapita masing-masing propinsi per empat tahun selama kurun waktu empat belas tahun selalu mengalami kenaikan kecuali Propinsi Aceh di tahun 2007 yang merupakan akibat dari tsunami tahun 2004. Pertumbuhan rata-rata PDRB perkapita propinsi di Sumatera tahun 2004-2012 adalah sebesar 5,08%. Akan tetapi pertumbuhan PDRB perkapita tersebut tidak menunjukkan kesetaraan antara PDRB perkapita propinsi satu sama

lain. Selisih antara PDRB perkapita tertinggi dengan PDRB perkapita terendah (Range PDRB perkapita) propinsi yang terjadi di Pulau Sumatera sangatlah jauh. Range PDRB perkapita propinsi tahun 2004 di Sumatera sebesar 20.110.078 rupiah, selang empat tahun range PDRB propinsi (tahun 2008) masih sangat tinggi yaitu sebesar 20.982.477 rupiah, dan empat tahun kemudian rangenya masih tinggi yaitu 20.302.709 rupiah. Fenomena ini menunjukkan bahwa pendapatan perkapita antar propinsi di Pulau Sumatera sangat timpang dan perlu dicari solusi untuk mengatasi ketimpangan tersebut.

Klasifikasi daerah yang di hasilkan melalui penelitian Soleh (2012 : 102) pada periode 2001-2010 untuk seluruh propinsi di Indonesia terlihat bahwa pengklasifikasian propinsi yang ada di Pulau Sumatera masih tersebar di empat kuadran dan belum mengkerucut dalam satu klasifikasi atau satu kuadran. Hal ini menunjukkan bahwa pendapatan perkapita dan pertumbuhan ekonomi propinsi di Sumatera masih timpang satu sama lain. Propinsi dengan klasifikasi daerah cepat maju dan cepat tumbuh adalah Propinsi Kepulauan Bangka Belitung, Kepulauan Riau,... propinsi dengan klasifikasi daerah cepat maju tapi tertekan adalah Aceh, Riau,... propinsi dengan klasifikasi daerah berkembang cepat adalah Sumatera Utara, Sumatera Barat, Jambi, Bengkulu, Lampung,... propinsi dengan klasifikasi daerah relatif tertinggal adalah Sumatera Selatan,...

Disisi lain, jumlah penduduk dari suatu daerah juga akan menentukan besarnya barang dan jasa yang bisa dihasilkan di daerah tersebut. Hal ini karena jumlah penduduk akan mencerminkan tenaga kerja sebagai salah satu faktor produksi terpenting dalam menghasilkan suatu produk berupa barang dan jasa. Nilai barang dan jasa yang dihasilkan tersebut menunjukkan seberapa besar pendapatan masing-masing propinsi yang sering disebut dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Dari hasil PDRB yang diciptakan oleh penduduk masing-masing propinsi di Sumatera tercermin laju pertumbuhan PDRB pada setiap propinsi di Pulau Sumatera (Tabel 1.2).

Dari laju pertumbuhan ekonomi propinsi yang tercipta terlihat bahwa hanya enam propinsi yang laju pertumbuhan PDRB nya naik secara berturut-turut dari tahun 2004, 2008, dan 2012, propinsi tersebut adalah Aceh, Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu, Lampung, dan Kepulauan Riau. Sedangkan tiga propinsi lainnya meliputi Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Riau hanya dari tahun 2004 ke tahun 2008 yang mengalami kenaikan dan ditahun 2012 mengalami penurunan pertumbuhan PDRB. Sedangkan propinsi Kepulauan Bangka Belitung mengalami penurunan yang signifikan ditahun 2008 meskipun tahun 2012 kembali naik, namun kenaikan pertumbuhan PDRB yang terwujud hanya menjadi 5,72%.

Tabel 1.2. Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2000

No	Propinsi	Laju Pertumbuhan PDRB (%)		
		2004	2008	2012
1	Aceh	-9,63	-5,24	5,21
2	Sumatera Utara	5,74	6,39	6,22
3	Sumatera Barat	5,47	6,88	6,35
4	Riau	2,93	5,65	3,55
5	Jambi	5,38	7,17	7,44
6	Sumatera Selatan	4,63	5,07	6,01
7	Bengkulu	5,38	5,76	6,60
8	Lampung	5,07	5,35	6,48
9	Kepulauan Bangka Belitung	9,01	4,60	5,72
10	Kepualaun Riau	6,47	6,63	8,21
<b>Sumatera</b>		<b>3,06</b>	<b>4,98</b>	<b>5,82</b>

Sumber: [bps.go.id](http://bps.go.id)

Melalui perkembangan pertumbuhan ekonomi, dapat juga dilihat bagaimana tingkat kesenjangan antar propinsi di pulau Sumatera. Disparitas (kesenjangan) pembangunan harus diatasi untuk menghasilkan pemerataan distribusi pembangunan di Pulau Sumatera.

Hasil studi Soleh (2012:94) menarik kesimpulan sebagai berikut:

Ketimpangan PDRB perkapita antar propinsi di Indonesia selama periode 2001-2010 menunjukkan bahwa tingkat kesenjangan sangat tinggi dengan nilai rata-rata indeks Williamson sebesar 0,852. Namun selama periode pengamatan tahun 2001-2010, nilai indeks Williamson cenderung mengalami penurunan. Pada tahun 2001 nilai indeks

Williamson sebesar 0,886 dan pada tahun 2010 nilai kesenjangan menjadi 0,813.

Disparitas antar propinsi di Sumatera yang terjadi pada periode 2001-2010 merupakan gambaran pembangunan di Pulau Sumatera. Disisi lain, fenomena yang ada saat ini adalah menunjukkan bahwa yang kaya lebih menguasai faktor produksi yang ada, khususnya faktor modal sehingga masyarakat yang kurang mampu (masyarakat miskin) terbatas dalam mengakses modal tersebut. Berikut ini gambaran dari persentase penduduk miskin antar propinsi di Pulau Sumatera.

Tabel 1.3. Persentase Penduduk Miskin 10 Propinsi di Sumatera Dalam 5 Tahun Terakhir

No	Propinsi	Jumlah Penduduk Miskin (%)				
		2008	2009	2010	2011	2012
1	Aceh	23,53	21,80	20,98	19,57	18,58
2	Sumatera Utara	12,55	11,51	11,31	11,33	10,41
3	Sumatera Barat	10,67	9,54	9,50	9,04	8,00
4	Riau	10,63	9,48	8,65	8,47	8,05
5	Jambi	9,32	8,77	8,34	8,65	8,28
6	Sumatera Selatan	17,73	16,28	15,47	14,24	13,48
7	Bengkulu	20,64	18,59	18,30	17,50	17,51
8	Lampung	20,98	20,22	18,94	16,93	15,65
9	Kepulauan Bangka Belitung	8,58	7,46	6,51	5,75	5,37
10	Kepualaan Riau	9,18	8,27	8,05	7,40	6,83
<b>Sumatera</b>		<b>14,381</b>	<b>13,192</b>	<b>12,605</b>	<b>11,888</b>	<b>11,216</b>

Sumber: [bps.go.id](http://bps.go.id)

Dari Tabel 1.3 terlihat bahwa seluruh propinsi di Sumatera berhasil menurunkan tingkat kemiskinan selama lima tahun terakhir. Hal yang menarik adalah bahwa tahun 2008 Propinsi Lampung memiliki persentase kemiskinan yang lebih tinggi dibanding Propinsi Bengkulu, namun lebih cepat mengatasi kemiskinan hingga tahun 2012. Hal ini terlihat dari persentase penduduk miskin tahun 2012 Propinsi Lampung sudah menjadi lebih kecil dibanding dengan Propinsi Bengkulu. Disisi lain, persentasi penduduk miskin terbesar adalah Propinsi Aceh dan terendah Propinsi Kepulauan Bangka Belitung. Besarnya persentase penduduk miskin di Kepulauan Bangka Belitung berbanding lurus dengan dengan jumlah penduduk propinsi tersebut. Hal ini karena Bangka Belitung memiliki jumlah penduduk

terkecil di Sumatera dan memiliki persentase jumlah penduduk miskin terkecil juga.

Dalam penelitian Soleh (2012 : 100) disebutkan bahwa hubungan antara pertumbuhan ekonomi Indonesia dan kesenjangan pembangunan ekonomi antar *region* di Indonesia tidak membentuk kurva U terbalik disebabkan oleh semakin membaiknya kondisi Indonesia baik dilihat dari pertumbuhan ekonomi yang semakin tinggi dan kesenjangan pembangunan ekonomi yang cenderung semakin merata.

Pada era sekarang, pemerintah daerah sedang gencar mempercepat tingkat pembangunan daerah melalui perbandingan dengan daerah lain di kawasan yang sama, dan bahkan membandingkan dengan kawasan lain untuk mencerminkan sampai dimana pembangunan ekonomi daerahnya di tingkat region tersebut. Untuk mewujudkan pembangunan daerah, tidak bisa hanya mengandalkan kemampuan dalam daerahnya saja akan tetapi membutuhkan kerjasama dengan daerah lain, yakni terkhusus sesama satu region tertentu seperti satu kawasan pulau, sub kawasan pulau, dan lain – lain.

Melalui uraian yang sudah dipaparkan di ataslah yang melatarbelakangi penulis untuk mengadakan penelitian yang berjudul “*Analisis Klasifikasi Daerah dan Disparitas Pembangunan Ekonomi Antar Propinsi di Pulau Sumatera*”

### **Rumusan Masalah**

Melalui latar belakang di atas, maka permasalahan pokok dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana klasifikasi daerah dilihat dari pertumbuhan ekonomi dan pendapatan perkapita antar propinsi di Pulau Sumatera tahun 2004-2012
2. Seberapa besar disparitas pembangunan ekonomi antar propinsi di Pulau Sumatera tahun 2004-2012

3. Bagaimana hubungan antara pendapatan perkapita dan disparitas pembangunan ekonomi di Pulau Sumatera tahun 2004-2012.

### **3.2. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui klasifikasi daerah dilihat dari pertumbuhan ekonomi dan pendapatan perkapita antar propinsi di Pulau Sumatera tahun 2004-2012.
2. Untuk mengetahui seberapa besar disparitas pembangunan ekonomi antar propinsi di Pulau Sumatera tahun 2004-2012
3. Untuk mengetahui hubungan antara pendapatan perkapita dan disparitas pembangunan ekonomi di Pulau Sumatera tahun 2004-2012

### **3.3. Manfaat Penelitian**

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Sebagai wadah pengembangan ilmu pengetahuan dalam meningkatkan kualitas ilmu pengetahuan bagi penulis.
2. Hasil penelitian ini diharapkan bisa sebagai bahan referensi bagi semua pihak yang ingin melanjutkan penelitian dengan kasus yang sama.
3. Penelitian ini adalah sebagai salah satu gambaran keadaan perekonomian dan disparitas pembangunan ekonomi di Sumatera yang selanjutnya dapat digunakan untuk pihak yang berkepentingan seperti “Forum Koordinasi Antar Provinsi Se-Wilayah Sumatra” yang sudah dirintis dari tahun 2011.

### **3.4. Ruang Lingkup Penelitian**

Batasan masalah dalam penelitian ini difokuskan pada wilayah Pulau Sumatera untuk melihat klasifikasi daerah, disparitas pembangunan, serta hubungan pendapatan perkapita dan disparitas pembangunan melalui pertumbuhan ekonomi dari sisi PDRB yang dihasilkan masing-masing propinsi, nilai indeks Williamson serta pendapatan perkapita propinsi periode 2004-2012. Alat analisis yang digunakan adalah Tipologi Klassen, Indeks Williamson, dan garis tren.

## **BAB II KAJIAN PUSTAKA**

### **2.1. Landasan Teori**

#### **2.1.1. Pertumbuhan Ekonomi**

##### **a. Pengertian dan Definisi Pertumbuhan Ekonomi**

Pertumbuhan ekonomi merupakan tingkat kegiatan ekonomi dari tahun ke tahun atau dengan kata lain jika tingkat kegiatan ekonomi adalah lebih tinggi daripada apa yang telah dicapai pada masa sebelumnya, maka keadaan ekonomi negara itu mengalami pertumbuhan atau perkembangan (Sukirno, 1985 : 19).

Menurut Wijono (2005), pertumbuhan ekonomi secara singkat merupakan proses kenaikan output perkapita dalam jangka panjang, pengertian ini menekankan pada tiga hal yaitu proses, output perkapita dan jangka panjang. Proses menggambarkan

perkembangan perekonomian dari waktu ke waktu yang lebih bersifat dinamis, output perkapita mengaitkan aspek output total (GDP) dan aspek jumlah penduduk, sehingga jangka panjang menunjukkan kecenderungan perubahan perekonomian dalam jangka waktu tertentu yang di dorong oleh proses intern perekonomian (*self generatin*). Pertumbuhan ekonomi juga diartikan secara sederhana sebagai kenaikan output total (PDB) dalam jangka panjang tanpa memandang apakah kenaikan itu lebih kecil atau lebih besar dari laju pertumbuhan penduduk dan apakah diikuti oleh perubahan struktur perekonomian atau tidak.

Disisi lain menurut Todaro (2007), pertumbuhan ekonomi dapat diartikan sebagai suatu proses perubahan yang berkesinambungan dari suatu kondisi perekonomian menuju keadaan yang lebih baik. Teori pertumbuhan ekonomi didefinisikan sebagai penjelasan mengenai faktor – faktor yang menentukan kenaikan output perkapita dalam jangka panjang dan penjelasan mengenai faktor – faktor tersebut berinteraksi satu sama lain, sehingga terjadi proses pertumbuhan.

Pertumbuhan ekonomi dapat dihitung dengan cara berikut:

Keterangan:  $X_{it}$  = PDRB tahun terakhir

$X_0$  = PDRB tahun awal

$t$  = Tahun

$g$  = Laju pertumbuhan

### **b. Ukuran Pertumbuhan Ekonomi**

Dalam menentukan pertumbuhan ekonomi, ada beberapa indikator yang dijadikan sebagai tolak ukur. Indikator tersebut biasanya tidak selalu digunakan secara keseluruhan melainkan diambil beberapa indikator dari beberapa indikator yang ada dan disesuaikan dengan kebutuhan dalam mengukur pertumbuhan ekonomi

tersebut. Indikator pertumbuhan ekonomi secara umum adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan atau harga berlaku, pendapatan perkapita, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dan Indeks Harapan Hidup (IHH) waktu lahir.

### **1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)**

Indikator yang paling banyak digunakan dalam mengukur keberhasilan ekonomi negara adalah perkembangan Produk Domestik Bruto (PDB) dan ditingkat daerah adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Hal ini karena PDB maupun PDRB sudah menggambarkan nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh daerah terkait sesuai dengan masing – masing sektor.

Salah satu data statistik yang lengkap, akurat, dan berkesinambungan yang dapat dijadikan sebagai alat ukur menyusun perencanaan dan kebijakan pembangunan di bidang ekonomi, dan sebagai alat ukur untuk mengevaluasi hasil pembangunan yang telah dicapai, dapat digunakan PDB atau PDRB. Informasi yang tercakup dalam PDB atau PDRB dapat digunakan dalam berbagai keperluan tersebut di atas diantaranya adalah kinerja perekonomian yang digambarkan oleh total PDRB atas dasar harga konstan maupun harga berlaku, pertumbuhan ekonomi, dan tingkat pendapatan perkapita penduduk. Dalam penggunaan yang lebih luas, data PDB atau PDRB sektoral dapat digunakan untuk perhitungan dana alokasi umum dan mengukur ketimpangan pembangunan atau disparitas pembangunan antar wilayah, (BPS, 2005 : 1)

Secara umum ada dua faktor yang menyebabkan naik turunnya pendapatan suatu daerah.

- a. Kenaikan atau penurunan riil, yakni suatu kenaikan atau penurunan pendapatan suatu daerah secara riil tanpa diikuti pengaruh dari harga. Bilaman terjadi kenaikan riil pendapatan masarakat maka daya beli

masyarakat tentu akan naik juga terhadap suatu barang yang sama dengan jumlah yang lebih banyak dibandingkan dengan yang sebelumnya.

- b. Kenaikan atau penurunan pendapatan yang dipengaruhi oleh kenaikan harga, yakni suatu kenaikan atau penurunan pendapatan masyarakat yang diakibatkan oleh perubahan harga sehingga jika pendapatan naik yang diakibatkan kenaikan harga maka akan menurunkan nilai beli uang. Dengan demikian, kenaikan pendapatan tersebut belum tentu dapat meningkatkan jumlah barang yang mampu untuk dibeli.

Dari uraian di atas, maka PDRB selalu disajikan dalam dua bentuk yaitu:

1. Atas dasar harga konstan, yakni hasil PDRB dihitung berdasarkan pada harga tahun tertentu sebagai patokan. Tahun yang dijadikan patokan tersebut disebut sebagai tahun dasar dalam penentuan harga konstan, sehingga yang mempengaruhi hasil PDRB adalah perubahan fisik dari berbagai sektor ekonomi yang dihasilkan setiap tahun sedangkan harga dianggap tetap.
2. Atas dasar harga berlaku, yakni hasil PDRB dihitung berdasarkan pada harga tahun sekarang atau harga sesuai pada tahun perhitungan. Dalam hal ini yang mempengaruhi hasil PDRB adalah perubahan fisik dari berbagai sektor ekonomi yang dihasilkan setiap tahun yang disertai dengan faktor inflasi dan deflasi.

## **2. Pendapatan Perkapita**

Pendapatan perkapita merupakan jumlah rata – rata pendapatan setiap individu disuatu daerah tertentu pada periode tertentu juga. Dengan demikian, pendapatan perkapita bisa diketahui dengan cara membagikan total jumlah pendapatan yang dihasilkan suatu daerah dengan jumlah penduduk daerah tersebut (total PDRB dibagi jumlah penduduk). Penduduk yang dimaksud adalah tanpa memperhatikan apakah seseorang sudah bekerja atau belum bekerja, apakah anak – anak atau

sudah dewasa. PDRB yang digunakan bisa PDRB berdasarkan harga konstan dan bisa juga berdasarkan harga berlaku, dalam hal ini disesuaikan dengan kebutuhan peneliti terkait.

Salah satu kegunaan pendapatan perkapita adalah sebagai ukuran dalam kesuksesan pembangunan ekonomi suatu daerah/negara. Selain daripada itu juga bisa digunakan untuk mengukur kesejahteraan masyarakat/penduduk. Dalam hal perbandingan tingkat kesejahteraan antar daerah dapat digunakan nominal rupiah, namun perbandingan kesejahteraan antar negara akan digunakan nominal dalam mata uang dollar (\$US). Mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat melalui pendapatan perkapita memiliki kelemahan karena:

1. Kesejahteraan masyarakat tidak hanya ditentukan oleh pendapatan perkapita melainkan juga adanya faktor non ekonomi.
2. Ada kelemahan metodologi dan statistik dalam menghitung pendapatan perkapita.
3. Kesejahteraan masyarakat bersifat subjektif.
4. Tidak memperhatikan komposisi umur penduduk, distribusi pendapatan, corak dan pola pengeluaran masyarakat, jumlah masa senggang, dan pengangguran yang tercipta.

### **2.1.2. Pembangunan Ekonomi**

Pembangunan ekonomi bisa di definisikan dengan beberapa pemahaman oleh beberapa ahli dalam bidangnya, akan tetapi pada dasarnya maksud dan tujuan yang dikemukakan adalah satu kesatuan yang yang tidak jauh berbeda satu sama lain. Hal ini karena tujuan dari pembangunan ekonomi adalah untuk pengupayaan kesejahteraan masyarakat kalangan bawah, menengah, dan kalangan atas tanpa terkecuali. Beberapa ahli ekonomi menganjurkan bahwa pembangunan ekonomi suatu daerah haruslah mencakup tiga nilai inti (Kuncoro, 2004):

1. Ketahanan (*Sustenance*) yakni kemampuan untuk memenuhi kebutuhan pokok (pangan, papan, kesehatan, dan proteksi) untuk mempertahankan hidup.
2. Harga diri (*Self Esteem*) yakni pembangunan haruslah memanusiakan orang. Dalam arti luas pembangunan suatu daerah haruslah meningkatkan kebanggaan sebagai manusia yang berada di daerah itu.
3. *Freedom From Servitude* yakni kebebasan bagi setiap individu suatu negara untuk berfikir, berkembang, berperilaku, dan berusaha untuk berpartisipasi dalam pembangunan.

Dalam hal pembangunan suatu daerah/negara, pemerintah tidak selalu difokuskan pada pembangunan masa kini akan tetapi dituntut juga untuk memikirkan pembangunan dimasa mendatang, dalam hal ini adalah pembangunan berkelanjutan. Pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan yang tidak menurunkan kapasitas generasi yang akan datang untuk melakukan pembangunan meskipun SDA berkurang dimasa kini namun digantikan dengan SDM atau kapital.

#### **2.4.3. Jumlah Penduduk**

Penduduk adalah semua orang yang berdomisili di wilayah negara republik Indonesia selama enam bulan atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari enam bulan tetapi bertujuan untuk menetap (BPS : 2001). Lebih luas didefinisikan bahwa penduduk adalah semua orang yang berdomisili di wilayah atau daerah tertentu yang dipengaruhi oleh kelahiran, kematian, dan imigrasi (perpindahan) pada suatu periode waktu tertentu”.

Menurut Budiyanto (2003 : 19) “penduduk adalah mereka yang bertempat tinggal atau berdomisili di dalam suatu wilayah negara (Menetap)”. Penduduk yang merupakan salah satu sumber daya dalam memproduksi suatu barang atau jasa akan menentukan jumlah output yang dihasilkan. Dengan demikian, secara umum semakain banyak jumlah penduduk suatu daerah maka semakin besar output yang

dihasilkan. Dalam hal ini adalah jumlah PDRB yang dihasilkan oleh suatu propinsi tertentu.

Jumlah penduduk Indonesia berada pada urutan ke empat dunia, jumlah ini diprediksi akan menopang keberhasilan Indonesia menjadi negara maju pada tahun 2035 yang akan datang. Sebagaimana disebutkan oleh Prof. Dorodjatun Kuntjoro-Jakti Ph.D dan ditulis ulang oleh Lana Soelistianingsih dalam jurnal yang berjudul “*Menerawang Indonesia: Pada Dasawarsa Ketiga Abad ke-21*”. Kemajuan Indonesia ini karena adanya bonus demografi berupa jumlah penduduk Indonesia yang banyak.

#### **2.4.4. Disparitas Pembangunan Ekonomi**

Pembangunan Ekonomi adalah proses kenaikan pendapatan perkapita secara terus menerus dalam jangka panjang diikuti oleh perubahan ke arah yang lebih baik dalam berbagai hal seperti kesejahteraan, struktur ekonomi, sikap, budaya, dan lain – lain. Semua propinsi berusaha semaksimal mungkin untuk meningkatkan pembangunan ekonomi daerahnya masing – masing. Sehingga para pemangku kepentingan dalam pemerintah daerah akan memaksimalkan untuk mencari solusi terbaik guna mencapai tujuan tersebut. Akan tetapi perjalanan menuju kesuksesan pembangunan ekonomi tersebut tidak semulus dan semudah membalikkan telapak tangan. Banyak kendala yang dihadapi setiap propinsi untuk menuju pembangunan yang sesuai dengan harapan.

Kebijakan masing – masing propinsi untuk mewujudkan pembangunan ekonomi daerah berbeda – beda satu sama lain sehingga hasil yang diperoleh juga akan berbeda – beda. Propinsi yang baru mekar atau baru berkembang biasanya masih susah untuk mewujudkan pembangunan sesuai dengan yang diharapkan, akan tetapi propinsi yang sudah lama berdiri akan lebih mandiri dan lebih mudah menyesuaikan perkembangan pembangunan daerahnya sendiri. Dengan demikian, akan terwujud ketimpangan pembangunan antar daerah dalam suatu wilayah

tertentu. Hal ini karena pertumbuhan ekonomi di propinsi yang baru berkembang memiliki laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi yang biasanya diiringi ketimpangan pendapatan sehingga terjadi ketidakmerataan dalam suatu daerah. Ataupun sering disebutkan bahwa pada tahap – tahap permulaan perkembangan terjadi disparitas yang semakin meningkat antar daerah yang sudah maju dan daerah yang masih berkembang. Akan tetapi pada tahap berikutnya akan terwujud kecenderungan kearah pemerataan pendapatan dan waktu perekonomian mulai memasuki tahap pendewasaan.

Menurut Dumairy (1996 : 35) bahwa penyebab ketimpangan pembangunan dan hasil – hasilnya secara kontek makro adalah sebagai berikut:

1. Karena ketidaksetaraan anugrah awal diantara pelaku-pelaku ekonomi. Maksudnya adalah bahwa sumber daya alam yang dimiliki tidak sama antar daerah, prasarana ekonomi yang tersedia tidak sama, begitu juga dengan kapital, keahlian/keterampilan, serta bakat atau potensi yang dimiliki setiap daerah tidak sama. Sebagian dari ketidak setaraan anugrah awal itu bersifat alamiah (*natural*) atau bahkan ilahiah, dan sebagian bersifat struktur. Ketidaksetaraan anugrah awal tersebut berakibat harapan dan kemungkinan terjadi untuk berkiprah dalam pembangunan yang tidak seimbang. Ada daerah yang dapat menyerap dengan cepat dalam membangun, serta akan ada pula yang lamban dalam menyerap pembangunan yang pada akhirnya menyebabkan ketidakmerataan di wilayah tersebut.
2. Ketidakmerataan terjadi karena strategi dalam era pembangunan jangka panjang pertama lebih bertumpuk pada satu aspek pertumbuhan (*growth*) saja. Sasaran pembangunan diarahkan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi, dengan prinsip efisiensi sebagai basis dalam pijakan. Walaupun aspek pemerataan menjadi prioritas utama dalam sebuah pembangunan.

Sedangkan secara kontek mikro, Syafrizal (1997 : 27) penyebab suatu ketimpangan pembangunan ekonomi antar daerah pada umumnya antara lain:

- a) Keterbatasan informasi pasar dan informasi teknologi untuk pengembangan produk unggulan.
- b) Belum adanya sikap *profesionalisme* dan kewirausahaan dari pelaku swasta.
- c) Belum optimalnya dukungan kebijakan nasional dan daerah yang berpihak kepada petani dan pelaku usaha.
- d) Belum berkembangnya infrastruktur kelembagaan yang berorientasi pada pengelolaan pengembangan usaha yang berkelanjutan dalam perekonomian daerah.
- e) Belum berkembangnya koordinasi, sinergitas, dan kerjasama diantara pelaku-pelaku pengembangan kawasan baik pemerintah, swasta, lembaga non pemerintah, dan petani serta antara pusat, propinsi, dan kabupaten atau kota dalam upaya peningkatan daya saing kawasan dan produk unggulan.
- f) Masih terbatasnya akses petani dan pelaku usah kecil terhadap modal pengembangan usaha, input produksi, dukungan teknologi, dan jaringan pemasaran dalam upaya pengembangan peluang usaha dan kerjasama investasi.
- g) Keterbatasan jaringan prasarana dan sarana fisik dan ekonomi di daerah dalam pengembangan kawasan dan produk unggulan daerah.
- h) Belum optimalnya pemanfaatan kerangka kerjasama antar daerah untuk mendukung peningkatan daya saing kawasan dan produk unggulan.

Selain itu, pemicu ketimpangan menurut Sjafrizal (2008: 117) adalah sebagai berikut:

### 1. Perbedaan Kandungan Sumberdaya Alam

Daerah dengan kandungan sumberdaya alam cukup tinggi akan dapat memproduksi barang-barang tertentu dengan biaya relatif murah dibandingkan dengan daerah lain yang mempunyai kandungan sumberdaya alam lebih rendah. Kondisi ini akan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah bersangkutan menjadi lebih cepat. Sedangkan daerah lain yang mempunyai kandungan sumberdaya alam yang lebih kecil hanya akan dapat memproduksi barang-barang dengan biaya produksi lebih tinggi sehingga daya saingnya menjadi lemah.

### 2. Perbedaan kondisi demografi

Daerah dengan kondisi demografi yang baik akan cenderung mempunyai produktivitas kerja yang lebih tinggi sehingga hal ini akan mendorong peningkatan investasi yang selanjutnya akan meningkatkan penyediaan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi daerah bersangkutan.

### 3. Kurang lancarnya mobilitas barang dan jasa

Bila mobilitas kurang lancar maka kelebihan produksi suatu daerah tidak dapat dijual ke daerah lain yang membutuhkan. Demikian juga halnya dengan migrasi yang kurang lancar menyebabkan kelebihan tenaga kerja suatu daerah tidak dapat dimanfaatkan oleh daerah lain yang sangat membutuhkan.

### 4. Konsentrasi kegiatan ekonomi wilayah

Pertumbuhan ekonomi akan cenderung lebih cepat pada daerah dimana terdapat konsentrasi kegiatan ekonomi yang cukup besar. Kondisi tersebut selanjutnya akan mendorong proses pembangunan daerah melalui peningkatan penyediaan lapangan kerja dan tingkat pendapatan

masyarakat. Sebaliknya jika konsentrasi kegiatan ekonomi relatif rendah akan mendorong terjadinya pengangguran dan rendahnya tingkat pendapatan masyarakat.

#### 5. Alokasi dana pembangunan antar daerah

Daerah yang dapat alokasi investasi yang lebih besar dari pemerintah, atau dari swasta akan cenderung mempunyai tingkat pertumbuhan ekonomi daerah yang lebih cepat. Kondisi ini dapat pula mendorong proses pembangunan daerah melalui penyediaan lapangan pekerjaan yang lebih banyak dan tingkat pendapatan perkapita yang lebih tinggi.

#### **2.1.5. Pengukuran Klasifikasi Daerah ( Tipologi Klassen)**

Dua indikator yang digunakan untuk mengklasifikasikan daerah adalah pertumbuhan ekonomi dan pendapatan perkapita atau PDRB perkapita suatu daerah. Kriteria yang digunakan dalam menganalisis dalam tipologi Klassen terdiri dari empat (Aswandi dan Kuncoro, 2004) :

- a) Kuadran I (pertama) yakni cepat maju dan cepat tumbuh (*high income and high growth*) adalah daerah yang memiliki pertumbuhan ekonomi dan pendapatan perkapita yang lebih tinggi dibandingkan dengan nasional.
- b) Kuadran II (kedua) yakni daerah maju tapi tertekan (*high income but low growth*) adalah daerah yang memiliki pendapatan perkapita lebih tinggi, tetapi tingkat pertumbuhannya lebih rendah dibandingkan dengan nasional.
- c) Kuadran III (ketiga) yakni daerah berkembang cepat (*high growth but low income*) adalah daerah yang memiliki tingkat pertumbuhan yang tinggi, tetapi tingkat pendapatan perkapita lebih rendah dibandingkan nasional.

- d) Kuadran IV (keempat) yakni daerah yang relatif tertinggal (*low growth and low income*) adalah daerah yang memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi dan pendapatan perkapita lebih rendah dibanding dengan nasional.

Pada Tabel 2.1 ditunjukkan pengklasifikasian daerah menurut tipologi Klassen, yang mana pengklasifikasian tersebut dijelaskan bahwa ada empat kuadran yang digunakan yaitu sebagai berikut:

Tabel 2.1 Klasifikasi Daerah Menurut Tipologi Klassen

Pendapatan perkapita (Y)	$Y_i > Y$	$Y_i < Y$
Laju pertumbuhan ( R )		
$R_i > R$	Daerah cepat maju dan cepat tumbuh	Daerah berkembang cepat
$R_i < R$	Daerah maju tapi tertekan	Daerah yang relatif tertinggal

Keterangan:  $R_i$  = Laju pertumbuhan PDRB daerah i

$R$  = Laju pertumbuhan PDB nasional/negara

$Y_i$  = Pendapatan perkapita daerah i

$Y$  = Pendapatan perkapita nasional/negara

Sedangkan untuk menghitung pertumbuhan PDRB dari masing-masing daerah yang diteliti dapat dirumuskan sebagai berikut:

Keterangan:  $X_{it}$  = PDRB tahun terakhir

$X_0$  = PDRB tahun awal

$t$  = Tahun

$g$  = Laju pertumbuhan

#### 2.1.6. Pengukuran Disparitas Pembangunan ( Indeks Williamson)

Jefrey Williamson dalam Manurung (1995 : 93) memberikan rumusan untuk mengukur ketimpangan regional yang dikenal dengan koefisien disparitas regional.

IW = Indeks Williamson

$Y_i$  = Pendapatan perkapita daerah  $i$

$Y$  = Pendapatan perkapita rata-rata seluruh daerah

$P_i$  = Penduduk daerah  $i$

$P$  = Penduduk seluruh daerah

Williamson menyebutkan bahwa jika nilai dari koefisien disparitas regional semakin besar maka ketimpangan di daerah tersebut semakin besar juga. Indeks Williamson bernilai antara 0 sampai 1. Apabila nilai dari indeks Williamson mendekati 0 (nol) maka pembangunan ekonomi antar daerah disuatu wilayah bisa disebut semakin merata. Begitu juga sebaliknya, apabila nilai dari indeks Williamson mendekati 1 (satu) maka pembangunan ekonomi antar daerah di wilayah tersebut semakin timpang. Lebih spesifik lagi dikategorikan bahwa jika nilai indeks Williamson antara 0,00-0,35 maka dikatakan pembangunan antar daerah cukup merata, jika nilai indeks Williamson antara 0,36-0,75 maka pembangunan antar daerah disebut moderat atau sedang, dan jika nilai indeks Williamson antara 0,76-1,00 maka pembangunan antar daerah sangat timpang.

Kelemahan indeks Williamson adalah sensitif terhadap definisi wilayah yang digunakan dalam perhitungan.

#### **d)4.7. Hubungan Antara Pendapatan Perkapita dan Disparitas Pembangunan Ekonomi**

Dalam masa pembangunan banyak perhatian yang memberikan perubahan pada distribusi pendapatan. Hal ini sudah diuji oleh Simon Kuznets dalam hipotesisnya di kurva U terbalik yang menyebutkan bahwasanya pada saat awal dimulai, distribusi dari suatu pendapatan akan semakin tidak merata, namun demikian distribusi pendapatan tersebut akan semakin merata pada saat mencapai pembangunan tertentu.

Simon Kuznets menemukan hubungan antara kesenjangan pendapatan dan tingkat pendapatan perkapita berbentuk U terbalik. Hasil tersebut diinterpretasikan sebagai evolusi dari distribusi pendapatan dalam proses transisi dari suatu ekonomi pedesaan ke suatu ekonomi perkotaan atau ekonomi industri. Pada saat awal dari suatu pembangunan, ketimpangan dalam proses distribusi pendapatan naik sebagai akibat dari proses urbanisasi dan industrialisasi. Kemudian pada akhir suatu proses tersebut ketimpangan akan menurun, yakni pada saat sektor industri di daerah perkotaan sudah mampu akan menyerap sebagian besar tenaga kerja yang datang dari pedesaan atau disaat pangsa dari pertanian lebih kecil di dalam produksi dan penciptaan pendapatan. Berikut ini adalah gambar dari kurva Kuznets.

Tingkat Ketimpangan (Koefisien Gini)

Gambar 2.1  
U Terbalik (Hipotesis Kuznets)

Dengan kata lain bahwasanya pada tahap awal dari pembangunan ekonomi akan terwujud ketimpangan yang memburuk atau membesar dan selanjutnya pada tahap berikutnya ketimpangan tersebut akan berangsur menurun. Akan tetapi pada suatu saat nanti ketimpangan akan menaik dan seperti itu seterusnya sehingga terwujud peristiwa yang berung – ulang (Aswandi dan Kuncoro, 2004).

## 1.2. Penelitian Terdahulu

Sunoto (2001), melakukan penelitian mengenai “Disparitas Pendapatan Inter Regional Antar Pulau di Indonesia Tahun 1996 Sampai Dengan Tahun 1999”. Hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa pada tahun 1996 Pulau Jawa dan Bali serta Pulau Kalimantan memiliki nilai indeks Williamson yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan pulau lain yaitu 0,12. Pada tahun 1999 Pulau Kalimantan tetap memiliki nilai indeks Williamson yang lebih tinggi dibanding pulau lain yaitu tetap sebesar 0,12, sedangkan pulau lain mengalami penurunan nilai indeks Williamson atau terjadi kecenderungan penuruunan ketimpangan pembangunan ekonomi, sementara itu Pulau Sumatera merupakan pulau yang memiliki nilai indeks Williamson yang lebih kecil jika dibandingkan dengan pulau lainnya di Indonesia.

Tiga tahun setelah penelitian Sunoto yaitu pada tahun 2004, Marihot Purba sudah melakukan penelitian terkait dengan hal “Analisis Disparitas Pembangunan di Wilayah Barat Indonesia”. Salah satu tujuan penelitian tersebut adalah untuk mengetahui bagaimana pola pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan

pembangunan di wilayah barat Indonesia dengan menggunakan alat analisis Indeks Williamson. Hasilnya adalah selama tahun 1995-1999 pertumbuhan ekonomi di wilayah barat Indonesia terus mengalami penurunan. Hal ini didasarkan pada tingkat pertumbuhan PDRB dan pendapatan perkapita penduduk yang semakin merosot. Selain itu, perkembangan sektoral di wilayah barat Indonesia cenderung bergeser dari sektor pertanian ke sektor jasa.

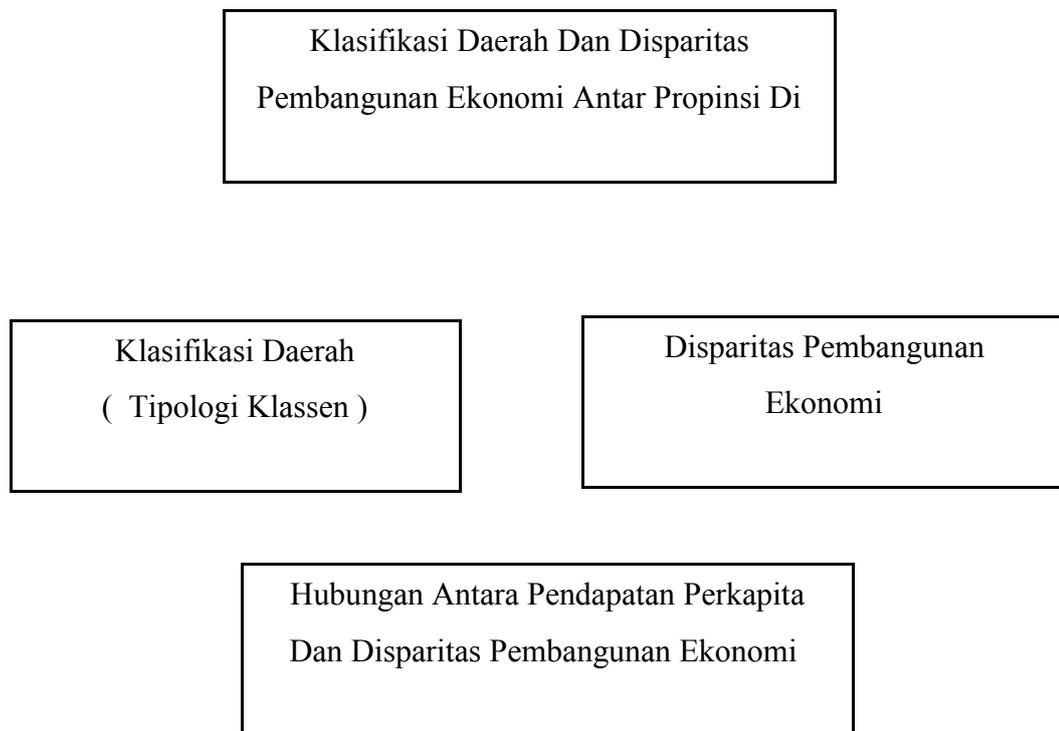
Pada tahun 2009 yaitu Delis juga melakukan penelitian “Analisis Pendapatan Antar Wilayah di Indonesia Tahun 1990-2008”. Hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa dengan menggunakan perhitungan indeks Williamson, selama periode 1990-2008 ketimpangan pendapatan antar wilayah di Indonesia terus mengalami peningkatan. Artinya bahwa selama periode tersebut kesenjangan antar wilayah di Indonesia semakin melebar.

Suatu penelitian terdahulu mengenai klasifikasi daerah dan disparitas pembangunan sudah pernah juga dilakukan oleh Linpiati (2010) dengan judul “Analisis Hubungan Pertumbuhan Ekonomi Dan Ketimpangan Pembangunan di Propinsi Bengkulu dan Sumatera Selatan “ dengan salah satu tujuannya adalah untuk menganalisa ketimpangan pembangunan Propinsi Bengkulu dan Propinsi Sumatera Selatan selama periode 1994 – 2007 dengan menggunakan alat analisis Indeks Williamson dan analisis korelasi. Hasil penelitian tersebut menghasilkan bahwa rata-rata tingkat pertumbuhan ekonomi Propinsi Bengkulu dan Sumatera Selatan adalah sama. Hasil perhitungan indeks Williamson menunjukkan bahwa tingkat ketimpangan pembangunan Propinsi Bengkulu dan Propinsi Sumatera Selatan relatif rendah (baik). Selain itu, tidak ada hubungan yang signifikan antara pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan pembangunan ekonomi di Propinsi Bengkulu dan Propinsi Sumatera Selatan.

Selain itu, Sitanggang (2013) juga sudah melakukan penelitian dengan menggunakan alat analisis shift share, Location Quotion, Analisis Overlay, dan Tipologi Klassen. Adapun judul penelitiannya adalah “Analisis Petumbuhan

Ekonomi Dan Ketimpangan Regional di Propinsi Sumatera Utara“. Hasil penelitiannya adalah ketimpangan pendapatan antar kabupaten/kota yang terdapat di Propinsi Sumatera Utara yang terbagi dalam empat wilayah tergolong dalam taraf ketimpangan yang tinggi hingga tahun 2005. Sedangkan untuk tahun selanjutnya terdapat wilayah yang mampu mewujudkan tingkat ketimpangan hingga pada level yang rendah yaitu pantai selatan pada kisaran 0,10. Tujuan otonomi daerah belum tercapai secara maksimal di Propinsi Sumatera Utara. Hal tersebut dibuktikan dengan laju pertumbuhan, PDRB perkapita, dan jumlah sektor unggulan yang ternyata justru membawa dampak penurunan ekonomi pada daerah asal. Daerah asal tumbuh lebih lambat daripada daerah pemekaran.

### 1.3. Kerangka Analisis



Gambar 2.2  
Kerangka Analisis

Dalam mengklasifikasikan daerah dalam suatu wilayah, akan digunakan analisis Tipologi Klassen yang membagi daerah menjadi dalam empat klasifikasi yaitu daerah yang cepat maju dan cepat tumbuh, daerah maju tapi tertekan, daerah berkembang cepat, dan daerah relatif tertinggal. Kemudian dalam mengukur disparitas pembangunan ekonomi antar daerah maka akan dianalisis dengan menggunakan alat analisis Indeks Williamson dengan suatu ketentuan yang berada diantara 0 sampai 1. Jika angka indeks Williamson mendekati nol maka hal itu menunjukkan bahwa disparitas pembangunan antar daerah semakin merata dan jika mendekati angka satu maka terjadi disparitas pembangunan yang semakin besar. Lebih spesifik lagi dikategorikan bahwa jika nilai indeks Williamson antara 0,00-0,35 maka dikatakan pembangunan antar daerah cukup merata, jika nilai indeks Williamson antara 0,36-0,75 maka pembangunan antar daerah disebut moderat atau sedang, dan jika nilai indeks Williamson antara 0,76-1,00 maka pembangunan antar daerah sangat timpang.

Disamping itu, untuk melihat hubungan antara pendapatan perkapita dengan disparitas pembangunan ekonomi maka digunakan garis tren dan didukung oleh hipotesis Kuznets. Hipotesis Kuznets menyebutkan bahwa pada tahap awal pembangunan ekonomi ketimpangan memburuk atau membesar yang berarti hubungan antara pendapatan perkapita dengan disparitas pembangunan ekonomi adalah berbanding lurus atau memiliki hubungan positif. Namun pada tahap awalan selanjutnya ketimpangan tersebut akan menurun yang menunjukkan bahwa pendapatan perkapita berbanding terbalik dengan disparitas pembangunan ekonomi atau hubungan negatif. Selanjutnya suatu saat tertentu ketimpangan akan naik kembali dan seterusnya mengalami siklus tersebut sehingga akan terjadi peristiwa yang berulang kali dan bila dilukiskan akan menggambarkan kurva U terbalik (Todaro, 2013).

## **BAB III METODE PENELITIAN**

### **3.1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini adalah suatu penelitian deskriptif yakni penelitian yang memiliki sebuah tujuan untuk memperoleh deskriptif data yang menggambarkan suatu karakter dan komposisi dari unit penelitian. Data dalam penelitian ini adalah data rentang waktu yaitu data time series dari tahun 2004-2012 antar propinsi di Pulau Sumatera.

### **3.2. Jenis dan Sumber Data**

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang bersumber dari instansi pemerintah beserta situs Badan Pusat Statisti (BPS). Data sekunder yang digunakan anatara lain adalah:

1. Data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dengan migas menurut propinsi di Pulau Sumatera tahun 2004–2012.

2. Data jumlah penduduk menurut propinsi di Pulau Sumatera tahun 2004–2012.

### **3.3. Definisi Operasioal**

- 1) Daerah (*Region*) dalam penelitian ini adalah propinsi yang ada di Pulau Sumatera.
- 2) Disparitas pembangunan ekonomi adalah ketidakseimbangan pembangunan ekonomi antar propinsi yang satu dengan yang lainnya di Pulau Sumatera. Untuk melihat disparitas pembangunan ekonomi digunakan alat analisis Indeks Williamson.
- 3) Klasifikasi daerah adalah pengelompokan propinsi kedalam empat kuadran yaitu kuadran I (pertama) merupakan daerah cepat maju dan cepat tumbuh, kuadran II (kedua) merupakan daerah maju tapi tertekan, kuadran III (ketiga) merupakan daerah berkembang cepat, kuadran IV (keempat) merupakan daerah relatif tertinggal. Alat analisis yang digunakan adalah tipologi klassen.
- 4) Pendapatan perkapita adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) suatu propinsi di Pulau Sumatera yang diukur dengan satuan rupiah tahun tertentu dibagi dengan jumlah penduduk propinsi tersebut pada kurun waktu 2004–2012.
- 5) Penduduk adalah jumlah penduduk masing- masing propinsi yang diukur dalam satuan jiwa pada kurun waktu 2004–2012.
- 6) Pertumbuhan ekonomi adalah perubahan persentase kenaikan/penurunan PDRB pada masing–masing propinsi yang diukur dalam satuan rupiah tahun 2004–2012 berdasarkan harga konstan tahun 2000.

- 7) Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah PDRB dengan migas atas dasar harga konstan tahun 2000 yaitu nilai tambah dari suatu barang dan jasa yang dihasilkan oleh masing–masing propinsi dengan memasukkan nilai migas dan diukur dalam satuan rupiah pada tahun 2004–2012.

### **3.4. Metode Pengumpulan Data**

Metode studi pustaka dan metode dokumentasi merupakan metode yang digunakan dalam penelitian ini. Metode studi pustaka digunakan untuk mendapatkan landasan teori yang dapat mendukung penulisan dan disajikan dalam bentuk referensi literatur atau buku karangan ilmiah maupun hasil penelitian sebelumnya yang linier dengan pokok permasalahan yang akan diteliti. Metode Dokumentasi merupakan data yang dihimpun dari instansi pemerintah yaitu Badan Pusat Statistik (BPS) propinsi Bengkulu dan situs resmi BPS pusat yaitu [bps.go.id](http://bps.go.id).

### **3.5. Metode Analisis**

#### **3.5.1. Analisis Klasifikasi Daerah**

Untuk mengklasifikasikan daerah di Pulau Sumatera maka digunakan alat analisis Tipologi Klassen dengan kriteria sebagai berikut:

- a) Kuadran I (pertama) yakni cepat maju dan cepat tumbuh (*high income and high growth*) adalah propinsi yang memiliki pertumbuhan ekonomi dan pendapatan perkapita yang lebih tinggi dibandingkan dengan Sumatera.
- b) Kuadran II (kedua) yakni daerah maju tapi tertekan (*high income but low growth*) adalah propinsi yang memiliki pendapatan perkapita lebih tinggi, tetapi tingkat pertumbuhannya lebih rendah dibandingkan dengan Sumatera.

- c) Kuadran III (ketiga) yakni daerah berkembang cepat (*high growth but low income*) adalah propinsi yang memiliki tingkat pertumbuhan yang tinggi, tetapi tingkat pendapatan perkapita lebih rendah dibandingkan Sumatera.
- d) Kuadran IV (keempat) yakni daerah yang relatif tertinggal (*low growth and low income*) adalah propinsi yang memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi dan pendapatan perkapita lebih rendah dibanding dengan Sumatera.

Tabel 3.1 Klasifikasi Daerah Menurut Tipologi Klassen

Pendapatan perkapita (Y)	$Y_i > Y$	$Y_i < Y$
Laju pertumbuhan (R)		
$R_i > R$	Daerah cepat maju dan cepat tumbuh	Daerah berkembang cepat
$R_i < R$	Daerah maju tapi tertekan	Daerah yang relatif tertinggal

Keterangan:  $R_i$  = Laju pertumbuhan PDRB propinsi i

$R$  = Laju pertumbuhan PDRB Sumatera

$Y_i$  = Pendapatan perkapita propinsi i

$Y$  = Pendapatan perkapita Sumatera

Sedangkan untuk menghitung pertumbuhan PDRB dari masing – masing propinsi yang diteliti dapat dirumuskan sebagai berikut:

Keterangan:  $X_{it}$  = PDRB tahun terakhir

$X_o$  = PDRB tahun awal

t = Tahun

g = Laju pertumbuhan

Teknik Tipologi Klassen (Analisis Tipologi) dapat digunakan untuk mengetahui gambaran tentang pola dan struktur pertumbuhan ekonomi daerah. Penggunaan indikator pertumbuhan ekonomi dan pendapatan per kapita daerah membuat analisis ini kurang adil terhadap daerah lain. Hal ini karena pada suatu daerah tersebut tidak memperhatikan distribusi pendapatan sikaya dengan simiskin melainkan diperlakukan sama satu dengan yang lainnya, sehingga tidak bisa memperlihatkan kesejahteraan yang sebenarnya terwujud di suatu daerah tersebut.

### **3.5.2. Analisis Disparitas Pembangunan Ekonomi**

Alat analisis yang digunakan dalam mengukur disparitas pembangunan ekonomi antar daerah adalah di pulau Sumatera adalah Indeks Williamson.

IW = Indeks Williamson

Y<sub>i</sub> = Pendapatan perkapita propinsi i

Y = Pendapatan rata – rata Sumatera

P<sub>i</sub> = Penduduk propinsi i

P = Penduduk Sumatera

Jika nilai Indeks Williamson (koefisien disparitas regional) semakin besar maka ketimpangan di daerah Sumatera tersebut semakin besar juga. Indeks Williamson bernilai antara 0 sampai 1. Apabila nilai dari indeks Williamson mendekati 0 (nol) maka pembangunan ekonomi antar propinsi di wilayah Sumatera bisa disebut semakin merata. Begitu juga sebaliknya, apabila nilai dari indeks Williamson

mendekati 1 (satu) maka disparitas pembangunan ekonomi antar propinsi di wilayah Sumatera tersebut semakin timpang. Tiga kategori indikator indeks Williamson adalah sebagai berikut:

1. Jika nilai indeks Williamson antara 0,00-0,35 maka dikatakan pembangunan antar daerah cukup merata.
2. Jika nilai indeks Williamson antara 0,36-0,75 maka pembangunan antar daerah disebut moderat atau sedang.
3. Jika nilai indeks Williamson antara 0,76-1,00 maka pembangunan antar daerah sangat timpang.

Namun perlu diketahui bahwa index Williamson ini mempunyai kelemahan yakni penghitungan ini baru menggambarkan tingkat pendapatan secara global sejauh mana dan berapa besar bagian yang diterima oleh kelompok yang berpendapatan rendah atau miskin bertambah tidak tampak dengan jelas. Selain itu, tidak dapat dihitung kontribusi masing-masing daerah terhadap ketimpangan pembangunan daerah secara keseluruhan sehingga tidak dapat memberikan implikasi kebijakan yang cukup penting. Serta memiliki kelemahan sensitive terhadap defenisi wilayah yang digunakan dalam perhitungan, artinya apabila ukuran wilayah yang digunakan berbeda maka akan berpengaruh terhadap hasil perhitungannya.

### **3.5.3. Analisis Hubungan Pendapatan Perkapita dan Disparitas Pembangunan Ekonomi**

Dalam menganalisis hubungan pendapatan perkapita dan disparitas pembangunan ekonomi, akan digunakan garis tren dan didukung oleh hipotesis Kuznets. Hipotesis Kuznets menyebutkan bahwa pada tahap awal pembangunan ekonomi ketimpangan memburuk atau membesar yang berarti hubungan antara pendapatan perkapita dengan disparitas pembangunan ekonomi adalah berbanding lurus atau memiliki hubungan positif. Namun pada tahap awalan selanjutnya

ketimpangan tersebut akan menurun yang menunjukkan bahwa pendapatan perkapita berbanding terbalik dengan disparitas pembangunan ekonomi atau hubungan negatif. Selanjutnya suatu saat tertentu ketimpangan akan naik kembali dan seterusnya mengalami siklus tersebut sehingga akan terjadi peristiwa yang berulang kali dan bila dilukiskan akan menggambarkan kurva U terbalik (Todaro, 2013).

Hipotesis Kuznets ini bisa dibuktikan dengan membuat grafik antara PDRB perkapita Sumatera dengan angka indeks Williamson untuk mengganti Koefisien Gini. Grafik ini mewujudkan hubungan antara PDRB perkapita (pendapatan perkapita) Sumatera dengan indeks Williamson. Dari hasil perhitungan pendapatan perkapita dan nilai indeks Williamson akan terwujud sebuah garis *trend* yang menunjukkan pada posisi mana garis *trend* tersebut dalam kurva U terbalik oleh hipotesis Kuznets.

## **BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **4.1. Hasil Penelitian**

#### **4.1.1. Deskripsi Pulau Sumatera**